



## **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



### **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUARA ENIM**

Jalan Jenderal A.Yani No. 14 Kelurahan Pasar I Muara Enim  
Telp/Fax (0734) 421175

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan karena atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Muara Enim Tahun 2024 ini dapat disusun. Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penyusunan RKA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja SKPD.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini akan tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka merencanakan pembangunan daerah 2024-2026.

Muara Enim

2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**



**ARDIAN ARIFANARDI, AP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197407201993111001

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II      Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Kab. Muara Enim Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD TAHUN 2022</b> .....	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.....	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim .....	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
<b>BAB III     TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>51</b>
3.1 Telaahan terhadap RPD dan Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.....	52
3.3 Program dan Kegiatan.....	52
<b>BAB IV     PENUTUP .....</b>	<b>57</b>

### 1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 3 tahun

Atas dasar alur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2024 yang menyajikan target Kerja SKPD tahun 2023 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo yang sekaligus merupakan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan rencana strategis tahun 2024-2026.

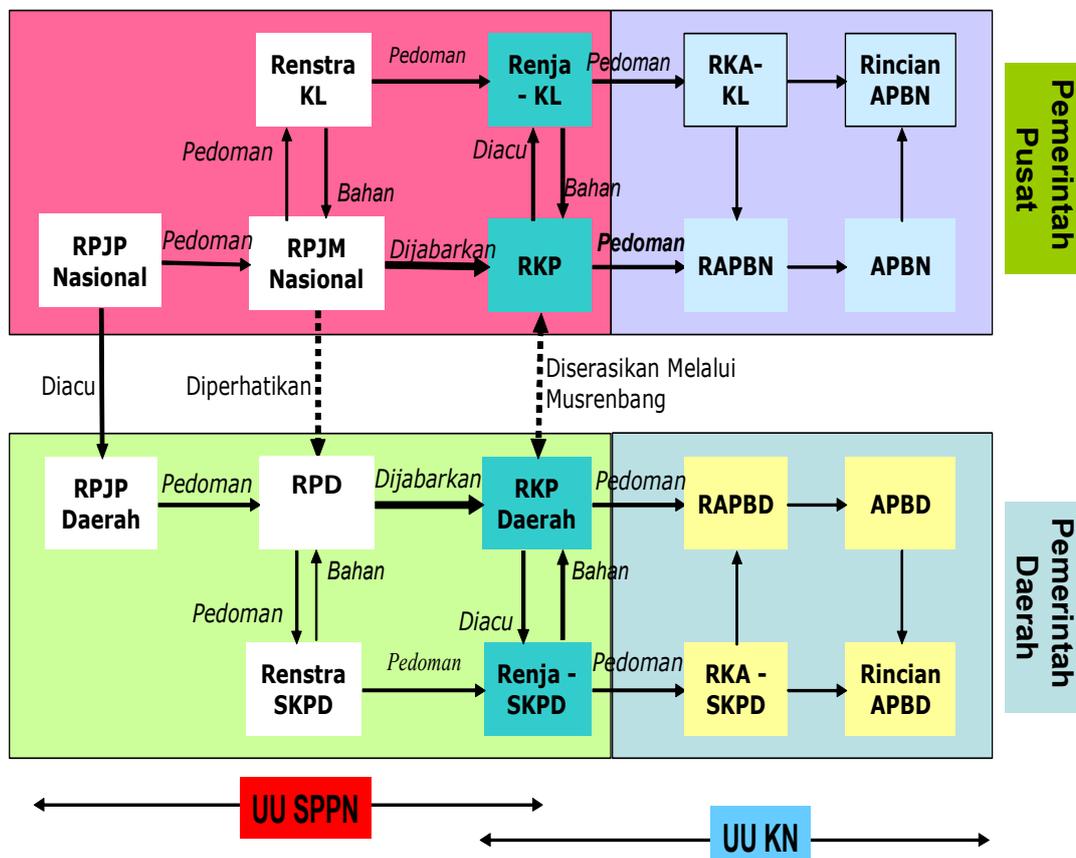
Dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai rencana tahun 2023, maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategis dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023.

Penetapan di muka rencana Kerja SKPD kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong (*drive*) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada akhir Tahun 2024.

Renja SKPD merupakan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Dari uraian diatas secara umum hubungan antara Rencana Kerja SKPD Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan dan penganggaran, baik skala nasional maupun daerah dapat dilihat pada skema 1.1 sebagai berikut.

Skema 1.1  
Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja-SKPD) diamanatkan beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undnag-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Permendagri nomor 86 tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
14. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan usunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2019) ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kominfo sebagai SKPD yang membantu Kabupaten Muara Enim;
2. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Tupoksi SKPD Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KOMINFO KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kominfo Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kominfo
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan RPJMD
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kominfo Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kominfo Tahun 2018-2023.**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan urusan, kewenangan dan tanggung jawab setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pada tahun 2022 Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim telah menyusun kebijakan pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dituangkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya mengemban 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar **Rp.20.969.401.343,00** terealisasi sebesar **Rp. 20.467.061.710,00** atau **97,60%** dengan rincian sebagai berikut :

**a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada tahun 2022 dialokasikan sebesar **Rp.19.412.876.289,-** terealisasi sebesar **Rp.18.923.105.157,-** atau **97,48%** yang diarahkan untuk membiayai belanja :

1. Belanja gaji dan tunjangan PNS, pembulatan gaji, tambahan penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya serta Tunjangan Kinerja PNS/CPNS dialokasikan sebesar **Rp. 3.898.992.066,00** terealisasi sebesar **Rp. 3.647.264.744,00** atau **93,54 %**.
2. Belanja barang dan jasa yang dialokasikan sebesar **Rp.15.513.884.223,00** terealisasi sebesar **Rp. 15.275.840.413,00** atau **98,47%**.

**b. Belanja Modal**

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp.1.556.525.054,00** terealisasi **Rp.1.543.956.553,-** atau **99,19 %**, yang dialokasikan untuk membiayai belanja :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar **Rp.1.541.525.054,00** terealisasi sebesar **Rp.1.528.956.553,00** atau **99,18%**.
2. Belanja modal aset tetap lainnya dialokasikan sebesar **Rp.15.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp.15.000.000,00** atau **100%**.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 program, 14 Kegiatan dan 45 sub kegiatan antara lain yaitu :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Alokasi anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Sebesar **Rp.7.091.503.461,-** dengan realisasi sebesar **Rp.6.780.055.970,-** atau **95,61%** program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sebesar **Rp.109.816.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp.100.857.250,-** atau **91,84%** kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) sub kegiatan sebagai berikut :

###### **a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD**

Dengan anggaran sebesar **Rp. 55.559.200,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.54.526.550,-** atau sebesar **98,14%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

###### **b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.36.122.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.30.725.500,- atau sebesar 85,06%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang**

ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.4.753.800,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.133.950,-** atau sebesar 86,96%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.2.250.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.956.250,-** atau sebesar 86,94%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- e. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.5.053.100,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.292.000,-** atau sebesar **84,94%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- f. Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar **Rp.6.077.600,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.223.000,-** atau sebesar **85,94%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen LPPD ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan jumlah dokumen AKIP ditargetkan sebanyak 5 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar **Rp.3.963.649.466,-** dengan realisasi sebesar **Rp.3.710.951.144,-** atau **93,62%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu antara lain:

- a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp.3.898.992.066,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.3.647.264.744,-** atau sebesar **93,54%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan pembayaran gaji ASN

ditargetkan sebanyak 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan anggaran sebesar **Rp.33.870.300,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.33.413.000,-** atau sebesar **98,65%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan akhir tahun yang ditargetkan sebanyak 10 buku dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.30.787.100,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.30.273.400,-** atau sebesar **98,33%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan semesteran yang ditargetkan sebanyak 2 laporan keuangan semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

### **3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebesar **Rp.28.276.750,-** dengan realisasi sebesar **Rp.28.196.500,-** atau **99,72%**. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.28.276.750,-** dengan realisasi sebesar **Rp.28.196.500,-** atau **99,72%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang diasuransikan yang ditargetkan sebanyak 14 unit kendaraan dinas/operasional dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

### **4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar **Rp.48.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.38.500.000,-** atau **80,21%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar **Rp.48.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.38.500.000,-** atau **80,21%**. Adapun output/keluaran dari

sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang mengikuti bimtek/pelatihan yang ditargetkan sebanyak 14 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **92,86%**.

## 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar **Rp.1.461.495.204,-** dengan realisasi **Rp.1.443.827.750,-** atau **98,79%**. Kegiatan ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar **Rp.15.067.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp.14.733.000,-** atau **97,78%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jenis alat listrik untuk penerangan bangunan kantor yang ditargetkan sebanyak 13 jenis alat listrik dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar **Rp.327.373.054,-** dengan realisasi sebesar **Rp.326.293.000,-** atau **99,67%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan sebanyak 16 jenis jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dengan anggaran sebesar **Rp.35.612.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.34.502.000,-** atau **96,88%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jumlah peralatan dan bahan pembersih yang ditargetkan sebanyak 26 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar **Rp.110.881.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.98.283.600,-** atau **88,64%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jenis alat tulis kantor yang ditargetkan sebanyak 44 jenis dan jenis bahan logistik kantor yang ditargetkan sebanyak 2 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- e. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp.58.961.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.57.848.150,-** atau **98,11%**. Adapun output/keluaran dari sub

kegiatan ini adalah jenis barang cetakan yang ditargetkan sebanyak 6 jenis dan jumlah penggandaan yang diatergetkan 41.263 lembar dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp.14.630.350,-** dengan realisasi sebesar **Rp.13.200.000,-** atau **90,22%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan jenis bahan bacaan yang ditargetkan sebanyak 11 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- g. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dengan anggaran sebesar **Rp.14.280.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.14.280.000,-** atau **100%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah rapat yang ditargetkan sebanyak 24 kali rapat dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- h. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.884.688.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.884.688.000,-** atau **100%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan SPPD keluar dan dalam daerah yang ditargetkan sebanyak 150 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

#### **6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar **Rp.956.652.000,-** dengan realisasi **Rp.949.388.553,-** atau **99,24%**. Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan dengan anggaran sebesar **Rp.805.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.798.278.553,-** atau **99,17%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 yang ditargetkan sebanyak 3 unit dan jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 4 yang ditargetkan sebanyak 2 unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp.151.652.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.151.110.000,-** atau

99,64%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jenis pengadaan mebeluer yang ditargetkan sebanyak 7 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

#### **7. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar **Rp.272.470.000,-** dengan realisasi **Rp.261.460.573,-** atau **95,96%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar **Rp.8.750.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.8.512.640,-** atau **97,28%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jenis materai dan paket pengiriman yang ditargetkan sebanyak 3 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar **Rp.160.999.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.150.227.933,-** atau **93,31%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah rekening telpon, air dan listrik yang harus dibayar yang ditargetkan sebanyak 3 rekening dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar **Rp.102.720.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.102.720.000,-** atau **100%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga administrasi ditargetkan sebanyak 5 orang, jumlah tenaga kebersihan ditargetkan sebanyak 1 orang dan jumlah tenaga keamanan kantor yang ditargetkan sebanyak 3 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

#### **8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar **Rp.251.143.741,-** dengan realisasi **Rp.246.874.200,-** atau **98,30%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar **Rp.176.049.741,-** dengan realisasi sebesar **Rp.174.714.200,-** atau **99,24%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan yang dibayar pajak yang ditargetkan sebanyak 14 unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.19.184.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.18.630.000,-** atau **97,11%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor yang terpelihara yang ditargetkan sebanyak 1 unit gedung kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.30.950.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.29.905.000,-** atau **96,62%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara ditargetkan sebanyak 4 jenis yaitu pemeliharaan Hardware peralatan radio, pemeliharaan software peralatan radio, pemeliharaan personal komputer/laptop, printer dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.24.960.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.23.625.00,-** atau **94,65%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara yang ditargetkan sebanyak 2 jenis yaitu pemeliharaan TV dan dan pemeliharaan AC dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

## **2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Alokasi anggaran untuk program informasi dan komunikasi publik sebesar **Rp. 7.443.862.200,-** dengan realisasi **Rp.7.351.930.398,-** atau **98,76%**. program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 7.443.862.200,-** dengan realisasi **Rp.7.351.930.398,-** atau **98,76%**. Kegiatan ini terdiri dari 7 (Tujuh) sub kegiatan berikut :

- a. Sub kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.142.624.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp.139.814.404,-** atau **98,03%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen fasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti tepat waktu yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.877.150.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.857.364.529,-** atau **97,74%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini jenis media penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media luar ruang yang ditargetkan sebanyak 5 jenis yaitu melalui baliho, spanduk, leaflet, billboard, majalah dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.364.971.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.357.911.974,-** atau **98,07%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan talk show radio yang ditargetkan sebanyak 18 kali talk show dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan pelayanan informasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.108.486.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.107.451.000,-** atau **99,05%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen layanan informasi publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- e. Sub kegiatan layanan hubungan media dengan anggaran sebesar **Rp.53.852.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.53.149.572,-** atau **98,70%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen informasi aktual yang diupdate melalui center yang

ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- f. Sub kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.89.438.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.88.801.645,-** atau 99,29%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang ditargetkan sebanyak 10 kali dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- g. Sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi dengan anggaran sebesar **Rp.5.807.339.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp.5.747.437.274,-** atau **98,97%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jenis media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa yang ditargetkan sebanyak 7 jenis adventorial yaitu majalah, media online, media TV, media tv gretings, surat kabar harian/mingguan, media buku, media kanal (online) yaitu dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

### **3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

Alokasi anggaran untuk program aplikasi informatika sebesar **Rp.5.718.240.182,-** dengan realisasi **Rp.5.624.873.519,-** atau **98,37%**. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 4.274.860.958,-** terealisasi sebesar **Rp. 4.211.222.021,-** atau **98,51%**. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan anggaran sebesar **Rp.4.274.860.958,-** dengan realisasi sebesar **Rp.4.211.222.021,-** atau **98,51%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jenis akses layanan internet yang ditargetkan

sebanyak 4 jenis yaitu bandwich Internet, metro ethernet, Internet Via Vsat, Collocation dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.1.443.379.224,-** terealisasi sebesar **Rp.1.413.651.498,-** atau **97,94%**. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar **Rp.197.205.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp.196.539.054,-** atau **99,66%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen SPBE yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dengan anggaran sebesar **Rp.245.607.350,-** dengan realisasi sebesar **Rp.241.350.745,-** atau **98,27%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini jumlah aplikasi yang diintegrasikan yang ditargetkan sebanyak 2 aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan anggaran sebesar **Rp.434.396.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.431.290.699,-** atau **99,29%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan smart regency yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dengan anggaran sebesar **Rp.566.170.074,-** dengan realisasi sebesar **Rp.544.471.000,-** atau **96,17%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jaringan TIK dan perangkat keras berfungsi optimal yang ditargetkan sebanyak 12 unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

#### 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar **Rp, 423.173.400,-** terealisasi **Rp. 418.897.883,-** atau **98,99%**. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota sebesar **Rp, 423.173.400,-** terealisasi **Rp. 418.897.883,-** atau **98,99%**. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dengan anggaran sebesar **Rp.389.316.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.385.702.683,-** atau **99,07%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen indek pembangunan manusia (IPM) yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan jumlah dokumen sosial ekonomi dalam Kabupaten Muara Enim yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen, jumlah dokumen kegiatan pendataan potensi desa yang ditargetkan 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi dengan anggaran sebesar **Rp.33.857.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.33.195.200,-** atau **98,04%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi statistik sektoral (SISTER) yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

#### 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebesar **Rp292.622.100,-** terealisasi **Rp.291.303.940,-** atau **99,55%**. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp, 231.146.100,-** terealisasi **Rp. 230.236.876,-** atau **99,61%**. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik dengan anggaran sebesar **Rp.159.634.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.159.180.300,-** atau **99,72%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah ruangan antisipasi penyadapan dan pembobolan data yang ditargetkan sebanyak 7 ruangan yaitu ruangan ketua DPR, ruangan 3 wakil DPR, Ruang Kerja Bupati, ruangan kerja Sekretaris Daerah, rumah dinas Bupati dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
  - b. Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar **Rp.71.511.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.71.056.576,-** atau **99,36%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi internet sehat dan aman yang ditargetkan sebanyak 200 orang peserta dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
2. Kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota.

Alokasi anggaran untuk kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota sebesar **Rp, 61.476.000,-** terealisasi **Rp. 61.067.064,-** atau **99,33%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar **Rp.61.476.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.61.067.064,-** atau **99,33%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi jaring komunikasi sandi yang ditargetkan sebanyak 16 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

## **Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim**

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Renstra memiliki implikasi terhadap Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023. Adapun Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai Berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Indeks SPBE	Indeks	2.95
Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Persen	90

Berdasarkan standar penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks SPBE hasil evaluasi eksternal Pemerintah Kabupaten Muara Enim dikategorikan baik. Nilai indeks SPBE tahun 2022 sebesar 2,91 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2021 yang nilai indeksnya 2,73, namun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 2,95 dikarenakan pencapaian saat ini masih dalam tahap penyesuaian evaluasi SPBE yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020. Dengan diterapkannya instrumen baru ini terdapat penyesuaian dalam penilaian untuk pencapaian peningkatan target indeks SPBE yang sudah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi, diharapkan laporan hasil evaluasi(LHE) SPBE dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Pencapaian target indikator kinerja Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pada tahun 2022 di targetkan sebesar 90 % terealisasi sebesar 100%.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim untuk mendukung Target Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis organisasi perangkat daerah, adapun dampak atau implikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dan dampaknya terhadap indikator kinerja Sebagai berikut :

### **Indikator Indeks SPBE**

#### Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pada Sub Kegiatan ini untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien dengan menggunakan sewa metro ethernet untuk kecamatan. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan Fonya dan sampai dengan tahun 2022 ini masih sewa. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan sewa jaringan Online/Internet/ Bandwidth internet dengan kecepatan 600 Mbps, sewa collocation untuk back up data center yang ada di nix data center jakarta dan batam. Untuk daerah yang sebelumnya tidak ada sinyal internet, di tahun 2022 ini telah dilakukan akses internet untuk desa blankspot dengan menggunakan jaringan Via Vsat.
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melakukan evaluasi SPBE diharapkan akan lebih meningkatkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari

pelaksanaan SPBE. Pelaksanaan koordinasi SPBE di lingkup Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang diatur dalam SK Bupati nomor 147/KPTS/Diskominfo/2022 tentang Tim Koordinasi SPBE.

Selain target diatas SPBE, target kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dengan melakukan monitoring terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim untuk mendata kondisi tower yang ada, kegiatan ini juga melakukan monitoring terhadap cakupan luasnya sinyal yang ada di daerah-daerah Kabupaten Muara Enim .

- Sub kegiatan pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam rangka penerpaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan sistem informasi daerah/aplikasi merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan SPBE, Dalam peningkatan pelayanan publik dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengembangan website desa. Untuk menjalankan website desa telah ada program satu desa satu tenaga IT (Informasi Teknologi) sejak tahun 2021 kemudian para tenaga IT diberi template website serta didukung dengan hosting (tempat untuk menyimpan semua file dan data, sehingga bisa diakses oleh semua orang melalui internet) dan telah dilakukan pelatihan – pelatihan kepada para Tenaga IT agar bisa mengoperasikan website desa dengan baik.

- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Smart Regency adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten mewujudkan Regency atau Kabupaten Muara Enim menjadi kabupaten yang bisa melayani, memudahkan pelayanan, mendekatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sedang menjadi kebutuhan masyarakat untuk informasi. Tujuannya adalah bagaimana bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Gerakan Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten Muara Enim dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim

Konsep Smart Regency juga menerapkan lingkungan yang lebih lestari karena konsep penganturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Tujuan kota pintar juga bagai mana dapat mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, menarik investor agar berinvestasi di kota ini, kemudian menarik penghuni baru, bagi mana penghuni baru dari kalangan baik profesional, akademisi, dan usahawan bertempat tinggal di kota kita. Kesemuanya itu tolak kukur nya adalah kota tersebut memiliki daya tarik yang kuat.

Sebuah Kabupaten dapat dikatakan Smart Regency jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki system transportasi yang lebih efisien dan terintergrasi. sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Konsep itu juga menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat, rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energy terbarukan.

Dengan Smart City maka semua organisasi perangkat daerah yang memiliki sistem informasi bisa terintegrasi dalam satu sistem, sehingga siapa pun, kapan pun di mana pun bisa mendapatkan informasi, dikaitkan dengan informasi publik yang ada di Kabupaten Muara Enim ini.

Keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dan meningkatnya nilai indek SPBE sangat didukung dengan Kabupaten Muara Enim merupakan satu dari 100 Kabupaten atau Kota di Indonesia yang terpilih sebagai *pilot project* dalam program *smart city* atau *smart regency*, dan juga telah membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang terdiri dari :

- Layanan internet pemerintah terpusat
  - Pusat data (data center) terintegrasi
  - Pembangunan jaringan FO untuk kemandan data
  - Muara Enim Command Center atau MECC
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah, untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien. Untuk jaringan internet dalam

kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan FO-nya dan sampai dengan tahun 2022 ini masih sewa. Untuk meningkatkan infrastruktur telah dilakukan pemeliharaan terhadap CCTV dan pemeliharaan terhadap infrastruktur Fiber Optik.

### **Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP**

#### 1. Monitoring Opini Aspirasi Publik

Pembangunan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan masyarakat (SPIPM) adalah sistem yang bertujuan untuk menampung keluhan / pengaduan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintahan dan mengenai pembangunan daerah dalam Kabupaten Muara Enim. Saat ini sudah ada aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena termasuk aplikasi Layanan Umum yaitu aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR SP4N), melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan laporan, keluhan ataupun pengaduan yang bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat dengan satu pintu melalui LAPOR SP4N sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah ditengah-tengah mereka. Pada tahun 2022 ini mendapatkan penghargaan dari Keme PAN-RB berupa pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik se-Indonesia untuk kategori Pemerintah Daerah atau mendapatkan piala Anggakara Bhirawa. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen fasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti tepat waktu. Pada tahun 2022, ditargetkan sebanyak 1 dokumen fasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti tepat waktu dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dokumen fasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti tepat waktu.

#### 2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik berisikan kegiatan tentang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui beberapa media antara lain :

##### a. Media Massa

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media massa seperti :

- Majalah

Penyebarluasan informasi melalui majalah yaitu majalah yang diterbitkan oleh dinas Komunikasi dan Informatika sendiri yaitu majalah L@ras. Majalah L@ras merupakan majalah yang memberikan informasi tentang Hasil pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim dan informasi mengenai pemerintahan daerah Kabupaten Muara Enim, ditampilkan juga ulasan mengenai berbagai aktifitas Bupati, Wakil Bupati, Sekda maupun organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pada tahun 2022 ini di cetak sebanyak 820 buku untuk dipublikasikan.

b. Media Baru

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media baru seperti :

- Website pemerintah Kab.Muara Enim (<http://muaraenimkab.go.id>)
- Facebook Diskominfo Muara Enim
- Instagram Diskominfo Muara Enim
- Youtube
- Twitter
- Aplikasi Muara Enim Centre (MANCE)
- Website PPID : [ppid.muaraenimkab.go.id](http://ppid.muaraenimkab.go.id)

c. Media Luar Ruang

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media luar ruang seperti :

- Billboard

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui billboard, pada tahun 2022 ini di cetak sebanyak 121 buah untuk dipublikasikan.

- Spanduk

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui spanduk, pada tahun 2022 ini di cetak sebanyak 204 buah untuk dipublikasikan.

- Baliho

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui baliho, pada tahun 2022 ini di cetak sebanyak 55 buah untuk dipublikasikan.

- Leaflet

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui leaflet, pada tahun 2022 ini di cetak sebanyak 187 Lembar untuk dipublikasikan.

### 3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan pengelolaan media komunikasi publik menyangkut kegiatan :

#### a. Talkshow radio

Target jumlah siaran radio / talkshow di tahun 2022 adalah 30 kali, sedangkan realisasi yang dicapai akhir tahun 2022 adalah 30 kali, Kegiatan ini berupa talkshow dan siaran tentang berita informasi hasil pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui streaming radio suara muara enim dan bekerjasama dengan radio serasan Muara Enim melalui siaran .ulang. Pada tahun 2022 pelaksanaan talkshow radio dengan tema :

- Menggali potensi kebudayaan
- SEIRAMA (Seniman daerah Muara Enim)
- Asuransi kematian
- Program desa digital bantu wujudkan masyarakat yang pintar dan smart
- Patuhi protokol kesehatan
- Tausiah jum'at
- Persiapan menghadapi pemilu 2024
- Testimoni pendengar radio yang akurat (TEMPOYAK)
- Verifikasi Faktual Menjelang Pemilu 2024
- Deteksi Dini Kanker pada anak
- Deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara
- Siaran radio tentang kebudayaan daerah (SIRINGKIH)
- Undang-undang cipta kerja

### 4. Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan pelayanan informasi publik berisikan kegiatan mengenai PPID. Sesuai dengan amanat undang-undang menyebutkan perlu ada lembaga masyarakat yang mengakses keterbukaan informasi publik maka ada lembaga yang bernama Komisi Informasi Publik (KIP) yang berada di Provinsi untuk di Kabupaten bernama Badan Publik. Di Badan Publik nama organisasinya Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang keanggotaannya seluruh Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) PPID berfungsi sebagai wadah penyedia informasi dan dokumentasi dibutuhkan masyarakat, dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih muda dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Jadi PPID utama ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sedangkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam Kabupaten Muara Enim adalah PPID Pembantu.

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. PPID adalah pejabat yang diangkat oleh pimpinan tertinggi badan publik melalui Surat Keputusan (SK). PPID bertanggung jawab kepada atasan langsung PPID. Atasan PPID merupakan penentu pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi termasuk dalam menentukan informasi yang dikecualikan atau tidak. Dalam melaksanakan wewenangnya, atasan PPID berkoordinasi dan meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen layanan informasi publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen tentang layanan informasi publik.

#### 5. Layanan Hubungan Media

Sub kegiatan layanan hubungan media mengelola kegiatan media center yaitu pusat informasi dan komunikasi publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, scanner, printer dan koneksi internet. Media center ini terletak di berbagai daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Harapannya, di seluruh provinsi, kota/kabupaten akan memiliki satu media center

Selain itu media center juga dapat menjadi jembatan penghubung informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan perangkat kerjanya, serta komunikasi dan informasi antar masyarakat. Konsep awal Media Center yang dulunya merupakan tempat mengakses informasi bagi wartawan, kini telah berubah menjadi tempat mengakses informasi dan berkomunikasi bagi masyarakat, baik pelajar, pekerja, masyarakat dari berbagai profesi, termasuk

wartawan. Pada tahun 2022 kegiatan ini ditarget 1 berkas dokumen informasi aktual yang diupdate melalui media center terealisasi sebanyak 1 berkas dokumen informasi aktual yang diupdate melalui media center terealisasi.

6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan

Indikator dari kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan adalah jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media :

a. Media massa

- Surat kabar

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui surat kabar yang kerjasama dengan pihak media yaitu melalui surat kabar harian dan surat kabar mingguan, tahun 2022 penyebarluasan informasi melalui surat kabar baik harian maupun mingguan dilaksanakan dengan 321 kali tayang.

- TV

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui TV yang kerjasama dengan pihak media yaitu TVRI, PalTV, TV One, untuk tahun 2022 dilaksanakan dengan 65 kali tayang.

b. Media Online

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media online yang kerjasama dengan pihak media online, untuk tahun 2022 dilaksanakan dengan 266 kali tayang.

c. Media Baru

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media baru seperti :

- Website pemerintah Kab.Muara Enim (<http://muaraenimkab.go.id>)
- Facebook Diskominfo Muara Enim
- Instagram Diskominfo Muara Enim
- Youtube
- Twitter
- Aplikasi Muara Enim Centre (MANCE)
- Website PPID : [ppid.muaraenimkab.go.id](http://ppid.muaraenimkab.go.id)

## **Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.**

Kebijakan atau tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mendukung Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis tersebut. Adapun Kebijakan/tindakan yang di lakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim**

Capaian kinerja pelayanan pada SKPD Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim di tahun anggaran 2022, menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang berdasarkan sasaran/target pada rencana strategis Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim tahun 2018 – 2023. Capaian kinerja tersebut dialokasikan pada Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan besaran anggaran sebesar **Rp.20.969.401.343,-** dan terealisasi sebesar **Rp.20.467.061.710,-** atau **97,60 %** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **99,78%** dengan rincian realisasi anggaran Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yaitu pada Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp.19.412.876.289,- terealisasi sebesar Rp.18.923.105.157,- atau 97,48% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi. Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.1.556.525.054,- terealisasi sebesar Rp.1.543.956.553,- atau 99,19 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Rincian capaian kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan pada tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo**  
**dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD Kominfo Tahun 2022**  
**Kabupaten Muara Enim**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/(5+6))	
	<b>Urusan Wajib</b>										
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
2	16	01						100%			
2	16	01	2.01					100%			
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%

2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	12 Laporan	100%
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 Dokumen	5 dokumen	100%
1	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	100%	34 Orang	34 Orang	100%
1	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 laporan	100%
1	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan keuangan semesteran	100%	2 laporan keuangan semesteran	2 laporan keuangan semesteran	100%			
2	16	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	16	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100 %
2	16	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-	-	34 Buah	34 Buah	100%
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	13 Orang	14 Orang	13 Orang	92,86%	14 Orang	14 Orang	100 %
2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100 %
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	16 Paket	100%	16 Paket	16 Paket	100 %
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100 %
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100 %

2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100 %
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	11 Dokumen	100 %
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	100%	24 Laporan	24 kali	100 %
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	100%	150 laporan	150 laporan	100 %
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	16	02	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 4 yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	2 unit	2 unit	100 %
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100 %
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	16	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	16	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100 %
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100 %
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	100 %
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	100%	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	100 %
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100 %
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100 %

2	16				<b>Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika</b>									
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah media komunikasi publik yang dikelola</b>	<b>6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)</b>	<b>6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)</b>	<b>6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)</b>	<b>6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)</b>	<b>100%</b>	<b>6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)</b>	<b>6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)</b>	<b>100%</b>
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan Media Center	100%	1 layanan Media Center	1 Layanan Media Center	100 %			
	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	50 Kelompok	50 Kelompok	100 %
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
2	16	03			<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>- Indeks domain kebijakan internal SPBE</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>100%</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>100 %</b>
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>- Persentase OPD yang terhubung jaringan VPN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100 %

2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>- Indeks aspek kelembagaan</b>	2,4	2,4	2,4	2,4	100%	2,4	2,4	100%
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen SPBE	1 Dokumen	100 %
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100 %
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	20				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>									
2	20	02			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna</b>	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah media penyajian data statistik sektoral</b>	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	100%	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	100%
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	100%	2 Dokumen (IPM, Sosek )	2 Dokumen (IPM, Sosek )	100 %
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	100 %
2	21				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>									
2	21	02			<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100 %
2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100 %

2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100 %
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 OPD	25 OPD	25 OPD	25 OPD	100%	25 OPD	25 OPD	100 %
2	21	02	2.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OPD yang melaksanakan jaring komunikasi sandi</b>	9 OPD	9 OPD	9 OPD	9 OPD	100%	<b>7 OPD</b>	9 OPD	100%
2	21	02	2.02	01	Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 OPD	9 OPD	9 OPD	9 OPD	100%	9 OPD	9 OPD	100%

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Muara Enim**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	proyeksi	catatan analisis
					Tahun 2022 (thn-n)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks SPBE	-	-	-	2,95	3,00%	2,91%	3,00%	
2	Persentase informasi Publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP				90%	90%	100%	100%	
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan internal SPBE implementasi kebijakan tata kelola				64%	64%	68,6%	68,6%	
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi layanan administrasi pemerintahan				100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Perangkat Daerah dan Area Publik yang terkoneksi jaringan internet		100%		81,82%	81,82%	81,82%	81,82%	
6	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi layanan publik instansi pemerintah				63,64%	63,64%	63,64%	63,64%	
7	Jumlah aplikasi umum berbagi pakai yang diimplementasikan oleh perangkat daerah				9	9	9	9	
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan aplikasi E-Office			-	60%	60%	60%	60%	
9	Persentase aplikasi yang terintegrasi				82%	82%	54,55%	54,55%	
10	Jumlah anggota tim pengarah SPBE yang melaksanakan tugasnya			-	7	7	7	7	
11	Persentase pemanfaatan pusat data			-	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	

12	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi berbagi pakai			-	100%	100%	100%	100%	
13	Jumlah jaringan FO				73	73	73	73	
14	Jumlah VSAT			-	7	7	7	7	
15	Jumlah radio outdoor			-	-	-	-	-	
16	Rata-rata kecepatan jaringan internet e-government			-	10Mbps	10Mbps	10 Mbps	10Mbps	
17	Jumlah inovasi layanan informasi statistik sektoral			-	2 (SMADA, SISTER)	2 (SMADA, SISTER)	2 (SMADA, SISTER)	2 (SMADA, SISTER)	
18	Persentase sarana dalam kondisi baik			-	100%	100%	100%	100%	
19	Persentase informasi, laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	80%	80%	100%	100	
20	Persentase SDM yang mengikuti Diklat di bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	70%	70%	70%	70%	
21	Persentase saranainformasi dan pengaduan terhadap pelayanan publik yang terpelihara				80%	80%	80%	80%	
22	Jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia				4 (LADAS, BUNGA DESA, GOES TO SCHOLL AND CAMPUS, layanan baleho atau pemutaran film)	4 (LADAS, BUNGA DESA, GOES TO SCHOLL AND CAMPUS, layanan baleho atau pemutaran film)	4 (LADAS, BUNGA DESA, GOES TO SCHOLL AND CAMPUS)	4 (LADAS, BUNGA DESA, GOES TO SCHOLL AND CAMPUS, layanan baleho atau pemutaran film)	
23	Persentase ASN yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola informasi publik				35,71%	35,71%	35,71%	35,71%	

24	Persentase pengaduan publik yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	
25	Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan publik				100%	100%	100%	100%	
26	Persentase layanan publik yang menyediakan layanan pengaduan				100%	100%	100%	100%	
27	Jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia				5 (PPID, SPIKM, LAPOR SP4N, WEB, SMS Gateway Gratis)	5 (PPID, SPIKM, LAPOR SP4N, WEB, SMS Gateway Gratis)	5 (PPID, SPIKM, LAPOR SP4N, WEB, SMS Gateway Gratis)	5 (PPID, SPIKM, LAPOR SP4N, WEB, SMS Gateway Gratis)	
28	Persentase sarana layanan PPID yang terpelihara				80%	80%	80%	80%	
29	Jumlah pengunjung WEB PPID				10500	10500	10500	10500	
30	Jumlah pejabat penghubung yang melaksanakan tugas sesuai SOP				68	68	68	68	
31	Tingkat kunjungan website Pemkab Muara Enim				80%	80%	80%	80%	
32	Jumlah Viewer Medsos Pemkab Muara Enim				40000 Viewer	40000 Viewer	40000 Viewer	40000 Viewer	
33	Sebaran Media Luar Ruang				22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	
34	Jumlah media baru yang digunakan	5 (Website, Facebook, Instagram, PPID, Mance,)			6 (Website, Facebook, Instagram, PPID, SPIKM, Mance,)				
35	Jumlah jenis media luar ruang yang digunakan dalam diseminasi informasi	7 ( Baleho, Spanduk, Videotron, Billboard, Leaflet, Booklet, Brosur)			7 ( Baleho, Spanduk, Videotron, Billboard, Leaflet, Booklet, Brosur)	7 ( Baleho, Spanduk, Videotron, Billboard, Leaflet, Booklet, Brosur)	7 ( Baleho, Spanduk, Videotron, Billboard, Leaflet, Booklet, Brosur)	7 ( Baleho, Spanduk, Videotron, Billboard, Leaflet, Booklet, Brosur)	
36	Jumlah media massa yang digunakan dalam diseminasi informasi	4 (Majalah, Surat kabar, TV, Radio)			4 (Majalah, Surat kabar, TV, Radio)				

37	Jumlah media sosial sebagai media laporan	2 ( Facebook, Instagram)			2 ( Facebook, Instagram)				
38	Jumlah media tatap muka/interpersonal yang digunakan dalam diseminasi informasi	1 (KIM)			1 (KIM)	1 (KIM)	1 (KIM)	1 (KIM)	
39	Cakupan layanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	
40	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	
41	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya				100%	100%	100%	100%	
42	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100%	100%	100%	100%	

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim**

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim

### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo**

- Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### **2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Untuk melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
3. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan urusan di di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan.
6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi dan Informatika di bagi dalam 4 bidang yakni :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Komunikasi dan Informatika serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik.
3. Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government.
4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik.
5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Tiap bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas;
  - b. Memverivikasi bahan, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas;
  - c. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
  - d. Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan administrasi kepegawaian;
  - e. Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;
  - f. Pengevaluasian bahan penyusunan laporan dan pelaksanaan program;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Fungsi Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, pengendalian dan pengawasan informasi publik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
  - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.
3. Fungsi Bidang Penyelenggaraan e-Government
- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penyelenggaraan E-Government;
  - b. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government;
  - c. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government;

- d. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government;
  - e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government;
  - f. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi, dan Tata Kelola E-Government;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Fungsi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi ;
  - b. perumusan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - g. pemantauan, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;

5. Fungsi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
  - e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
  - f. pemantauan, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;

### **3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penggabungan dari Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Pengelolaan Data & Arsip dan Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, dua Dinas dan satu subdin tersebut di atas dilebur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 3

Tahun 2022 tentang pembentukan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 tahun 2016 terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang susunan, kedudukan, tugas fungsi dan struktur organisasi dinas Komunikasi dan Informatika. dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi mulai diterapkan sebagai tindaklanjut terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dalam ayat 1 pasal 350A dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan kedalam jabatan fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan. Penyetaraan dimaksud ditetapkan dengan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dengan struktur organisasinya terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Perencana Muda Sub-koordinator Perencanaan
  - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Sub-koordinator Keuangan
- C. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, membawahi :
  - a. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Pengelolaan Opini Publik
  - b. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Layanan Informasi Publik
  - c. Statistisi Muda Sub-koordinator Pengelolaan Data dan Statistik
- D. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
  - a. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - b. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
  - c. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Tata Kelola E-Government
- E. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi , membawahi :
  - a. Sandiman Muda Sub-koordinator Pengawasan dan Evaluasi Persandian
  - b. Sandiman Muda Sub-koordinator Tata Kelola Persandian
  - c. Manggala Informatika Muda Sub-Koordinator Keamanan Informasi
- F. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :

- a. Pranata hubungan masyarakat Muda Sub-koordinator Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - b. Pranata Siaran Muda Sub-koordinator Kemitraan Komunikasi Publik
  - c. Pranata Hubungan Masyarakat Muda Sub-koordinator Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik
- G. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- H. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

##### 1. Kepegawaian

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dengan perincian :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim**  
**Menurut Distribusi Perbidang, Status, Pangkat dan Golongan**

Status Kepegawaian/Pangkat	Golongan/Ruang	Kepala	Unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo				Bidang PKP	Total
			Sekretariat	Bidang PDIPS	Bidang E-Gov	Persandian dan Keamanan Informasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>								
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1						1
2. Pembina Tk I	IV/b	-	1	-	-	-	-	1
2. Pembina	IV/a	-	-	-	-	1	1	2
3. Penata TK I	III/d	-	3	3	2	2	1	11
4. Penata	III/c	-	1	1	2	-	3	7
5. Penata Muda TK I	III/b	-	2	1	-	-	-	3
6. Penata Muda	III/a	-	-	2	2	1	1	6
7. Pengatur TK I	II/d	-	-	-	-	-	-	-
8. Pengatur	II/c	-	2	-	1	-	-	3
9. Pengatur Muda TK I	II/b	-	-	-	-	-	-	-
10. Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	
<b>B. Honorarium Daerah</b>								
<b>JUMLAH</b>		1	9	7	7	4	6	34

Tabel 2.4.  
Susunan Kepegawaian Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim  
Menurut Tingkat Pendidikan.

Pendidikan	Kepala	Unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo					KET.
		Sekretariat	Bidang PDIPS	Bidang E-Gov	Persandian dan Keamanan Informasi	Bidang PKP	
<b>A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>							
1. S-2	1	2	3	1	1	-	<b>8</b>
2. S-1	-	5	4	4	3	6	<b>22</b>
3. D-3	-	1	-	1	-	-	<b>2</b>
4. SLTA / Sederajat	-	1	-	1	-	-	<b>2</b>
5. SLTP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
6. SD / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. CPNS</b>							
1. S-1	-	-	-	-	-	-	-
2. D-3	-	-	-	-	-	-	-
3. SLTA / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
4. SLTP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
5. SD / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>34</b>

## 2. Perlengkapan

Jumlah perlengkapan Dinas yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim yang didalamnya mencakup beberapa barang inventaris dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.5  
Daftar Sarana Prasarana  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>TANAH</b>		
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	<b>139 m2</b>	Baik
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
	<b>Komputer</b>		
	- P.C Unit	43	Baik

- Lap Top	18	Baik
- Note Book	1	Baik
- Tablet PC	1	Baik
- Personal Komputer lainnya	22	Baik
- Hard Disk	18	Baik
- Peralatan Minikomputer lainnya	1	Baik
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	Baik
- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
- Peralatan Personal Komputer lainnya	2	Baik
- Server	10	Baik
- Router	117	Baik
- Hub	71	Baik
- Modem	2	Baik
- Repeater and Transciever	8	Baik
- Kabel UTP	3	Baik
- Switch	2	Baik
- Acces Point	106	Baik
- Peralatan Jaringan lainnya	61	Baik
<b>Alat Eksplorasi</b>	2	Baik
- Converter	2	Baik
<b>Alat Angkutan</b>	19	Baik
- Kendaraan dinas roda 4 Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	Baik
- Kendaraan dinas roda 4 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	5	Baik
- Sepeda Motor	12	Baik
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	9	Baik
- Tripod	2	Baik
- Spektrum Analyzer	1	Baik
- Global Positioning System	3	Baik
- Scanner (Universal Tester)	2	Baik
- Termometer Standar	1	Baik
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	475	Baik
- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Baik
- Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Baik
- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	Baik
- Rak Besi	10	Baik

- Filing Cabinet Besi	7	Baik
- Brandkas	1	Baik
- Lemari Kaca	1	Baik
- Alat Penyimpanan Kantor lainnya	16	Baik
- CCTV - Camera Control Television System	34	Baik
- Alat Penghancur Kertas	6	Baik
- Alat Pemotong Kertas	2	Baik
- Alat Pengaman / Sinyal	2	Baik
- Penangkal Petir	1	Baik
- LCD Projector/Infocus	3	Baik
- Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2	Baik
- Papan Nama Instansi	2	Baik
- Alat Kantor Lainnya	52	Baik
- Meja Kerja Besi/Metal	5	Baik
- Meja Kerja Kayu	3	Baik
- Kursi Besi/Metal	34	Baik
- Meja Resepsionis	1	Baik
- Meja Bundar	1	Baik
- Meja Biro	8	Baik
- Kursi Rapat	63	Baik
- Kursi Putar	14	Baik
- Meja Komputer	22	Baik
- Sofa	2	Baik
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
- A.C. Sentral	1	Baik
- A.C. Split	20	Baik
- Alat Pendingin lainnya	1	Baik
- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
- Tabung Gas	1	Baik
- Rak Piring Alumunium	1	Baik
- Mixer	1	Baik
- Televisi	11	Baik
- Video Cassette	1	Baik
- Amplifier	1	Baik
- Loudspeaker	2	Baik
- Sound System	1	Baik
- Wireless	11	Baik
- Microphone	7	Baik
- Microphone Floor Stand	4	Baik

- Unit Power Supply	10	Baik
- Stabilisator	5	Baik
- Camera Video	3	Baik
- Tangga Aluminium	3	Baik
- Dispenser	2	Baik
- Handy Cam	4	Baik
- DVD Player	2	Baik
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	18	Baik
- Alat Pemadam/Portable	2	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	23	Baik
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	Baik
- Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	Baik
<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	246	Baik
- Audio Mixing Portable	1	Baik
- Disc Record Player	1	Baik
- Microphone/Wireless MIC	1	Baik
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Baik
- peralatan studio audio lainnya (dst)	15	Baik
- Camera Electronic	67	Baik
- Video Processor	1	Baik
- Tripod Camera	2	Baik
- Lensa Kamera	2	Baik
- Layar Film/Projector	6	Baik
- Alat Studio Video Lainnya	3	Baik
- Alat Studio Lainnya	19	Baik
- Handy Talky (HT)	3	Baik
- Facsimile	4	Baik
- Telopon digital	63	Baik
- Alat komunikasi radio HF/FM	39	Baik
- Mainframe	6	Baik
- Antena UHF	1	Baik
- Genzet	3	Baik

	<b>Alat Laboratorium</b>		
	- Digital indikator	1	Baik
	- tripod	1	Baik
	- Pinn Filter	1	Baik
	- Converter	2	Baik
	- Transmitter	1	Baik
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen Jln. Bambang Utoyo No.20 Muara Enim	139	Baik
	- Taman lainnya Jln. Bambang Utoyo No.20 Muara Enim	133	Baik
	- Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain Jln. Lintas Sumatera Ujan Mas	50	Baik
	- Pagar Permanen Jln. Bambang Utoyo No.20 Muara Enim	756	Baik
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		
	- Instalasi Penangkal Petir Manual Kantor Camat Gunung Megang		Baik
	- Peralatan Instalasi listrik kantor kominfo jl. Bambang utoro		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain kantor Camat Benakat		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain Kecamatan Lawang kidul		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain kantor Camat muaa enim		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain kantor DPRD Muara enim		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-lain Kantor Inspektorat Kab. Muara Enim		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-lain Sekretariat ULP Kelurahan Tungkal		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas keci kecamatan gelumbang		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil kecamatan Kelekar		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil kecamatan Lembak		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil kecamatan lubai		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecamatan Rambang		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil Kecamatan Rambang Dangku		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil Kecamatan Sungai Rotan		Baik
	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain		Baik
	- Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas		Baik
<b>5</b>	Aset Lainnya		
	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>		

	- Software	8	Baik
	<b>Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain</b>		
	- Infocus		Rusak Berat
	- Proyektor		Rusak Berat

➤ **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Hal lain yang dianggap penting pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim terkait tugas, pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur perencanaan adalah masih kurangnya Sumber daya Manusia yang memiliki jenjang pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana di bidang perencanaan yang notabene sangat diperlukan dalam rangka pemikiran-pemikiran yang visioner dan mampu menganalisis kondisi yang ada menjadi kekuatan dalam perencanaan pembangunan daerah saat ini dan masa mendatang. Serta sumber daya manusia yang berbasis pendidikan Teknologi Informasi (IT).

Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga masih relatif terbatas sarana dan prasarana penunjang kerja dan tenaga teknis bidang programmer dan tenaga jaringan, tenaga persandian guna menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

➤ **Dampak nya Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Terhadap Capaian SPM**

Dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika telah di tetapkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/per/m.kominfo/12/2010 tentang SPM bidang komunikasi dan informatika di kabupaten/kota. serta pasal 11 ayat (4) Undang Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang Komunikasi dan Informatika, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 supaya memperlihatkan hal-hal berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

**Tabel 2.6**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika.**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	<p>Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:</p> <p>a. Media massa: - Majalah - Radio - Televisi</p> <p>b. Media website (media online)</p> <p>n. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;</p> <p>d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;</p>
		<p>e. Media luar ruang: - Buletin - Leaflet - Booklet - Brosur - Spanduk - Baliho</p>
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Semua Indikator yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika telah didukung oleh kegiatan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Adapun kegiatan kegiatan yang mendukung Indikator Standar Pelayanan Minimal tersebut sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	30 kelompok
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Keberadaan Website milik Pemerintah Daerah	12 bulan

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	jenis media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi	4 jenis (Media Massa, Media Baru, Media Luar Ruang, Media Tatap Muka)
Pengembangan/pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi	Jenis Akses Layanan Internet	7 Jenis

### ➤ **Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Pengembangan komunikasi dan informasi yang dibangun adalah, pada pemangku kepentingan di tingkat biroksi serta masyarakat sebagai penerima pelayanan. Peluang ini cukup besar dan respontif karena masyarakat juga menghaapkan komunikasi dan informasi dalam melaksanakan program pembangunan. Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan salah satunya adalah dngan metode pendekatan yang efektif seperti dialog interaktif, komunikasi keliling, media elektronik keliling, media elektronik, serta melalui seni tradisional yang masih digandrungi oleh masyarakat.

Untuk mengembangkan peluang tersebut, maka media teknologi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam Era sekarang, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan IT telah menyentuh sebagian besar masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat pedesaan sabagai kaum marginal. Sebagai pendukung pembangunan, jelas bahwa IT sudah familiar pada sebagian masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informasi antara lain sebagai berikut:

1. Belum meratanya penyebaran informasi pada seluruh lapisan masyarakat dan kondisi ini akan mendorong masyarakat bersikap apatis terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang eksistensinya berperan penting sebagai wadah diseminasi informasi.
3. Belum Optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi Public sesuai dengan Undang-undang KIP.
4. Terjadinya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat disebabkan kurang optimalnya fasilitas teknologi informasi.

5. Belum di laksanakan IT sebagai pendukung kelancaran informasi belum dikembangkan secara optimal.
6. Fasilitas pengembangan IT sebagai pendukung kelancaran Informasi belum dikembangkan secara optimal.
7. Belum optimalnya pengelolaan menara Telekomunikasi yang berperan penting sebagai peningkatan pendapatan daerah.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Meratanya penyebaran informasi pada seluruh lapisan masyarakat melalui diseminasi informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan KIM dan lembaga pelayanan informasi pada setiap SKPD sebagai wadah distribusi dan diseminasi informasi pada masyarakat.
3. Terlaksananya pengelolaan keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik di seluruh kabupaten Muara Enim.
4. Meningkatnya pengembangan jaringan IT yang mendukung penyebarluasan informasi, meningkatkan kinerja dan pelayanan birokrasi.
5. Terwujudnya penyelenggaraan menara telekomunikasi dan retribusinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

➤ **Formulasi Isu-Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategik untuk di tinjak lanjuti**

Teknologi informasi dan komunikasi menjajikan efisiensi, Kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang gombal dan transparasi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintah yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-goverment* . pelaksanaan e- goverment yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Isu strategi yang menjadi tantangan tugas pokok dan fungsi dinas komunikasi dan informatika kabupaten Muara Enim ke depan lebih

menitikberatkan pada peran teknologi dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Melalui peran teknologi, maka tiga hal pilar penting dalam pembangunan reformasi yakni transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dapat tercapai. Dengan pendekatan ilmiah dan logis (teknoratik).

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026. Selain itu, penyusunan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim tahun 2024 juga mempedomani RPD Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026. Proses kesesuaian Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim tahun 2024 terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Penjelasan terhadap temuan – temuan setelah proses membandingkan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau besaran kegiatan berbeda dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Muara Enim

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim

Kode					Rancangan Awal RKPD					Program/Kegiatan					
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					28.143.247.389,00	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar				28.143.247.389,00
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%		7.466.980.043,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		7.466.980.043,00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100%		47.383.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu		47.383.900,00
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		20.363.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	20.363.200
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		8.549.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	8.549.200
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		4.820.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.820.000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		2.466.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.466.400

2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	5.143.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	5.143.200
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.041.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.041.900
1	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Muara Enim</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4.672.562.997,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Muara Enim</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4.672.562.997,00</b>
1	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	4.660.637.897	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Og/bln	4.660.637.897
1	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.241.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.241.400
1	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.683.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.683.700
2	16	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Muara Enim</b>	<b>Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>36.729.000,00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Muara Enim</b>	<b>Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>36.729.000,00</b>
2	16	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.729.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok	36.729.000,00
2	16	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>85.520.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>85.520.000,00</b>
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	34 Buah	18.020.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	34 Buah	18.020.000,00

2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	67.500.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	67.500.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah</b>	100%	<b>1.326.072.800,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah</b>	100%	<b>1.326.072.800,00</b>
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.067.300	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.067.300
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	189.839.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	189.839.700
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	36.956.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	36.956.500
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	129.698.500	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	129.698.500
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.792.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	37.792.200
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Enim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen	14.625.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Enim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dok	14.625.600
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Enim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	16.320.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Enim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	16.320.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Enim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	885.773.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Enim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	885.773.000

2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Muara Enim	<b>Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100%	<b>173.963.270</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Muara Enim	<b>Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>173.963.270,00</b>
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Muara Enim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Muara Enim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Muara Enim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	123.963.270	Pengadaan Mebel	Muara Enim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	123.963.270
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100%	<b>326.027.035</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100%	<b>326.027.035,00</b>
2	16	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.352.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	14.352.000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	178.475.035	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	178.475.035
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	133.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	133.200.000
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>	100%	<b>798.721.041</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>	100%	<b>798.721.041,00</b>
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	296.609.541	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	296.609.541
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	394.701.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	394.701.500
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	30.950.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	30.950.000
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	76.460.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	76.460.000

2	16				Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika				19.725.053.846,00	Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika				19.725.053.846,00
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase diseminasi konten media komunikasi publik	90%	7.977.101.300,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase diseminasi konten media komunikasi publik	90%	7.977.101.300,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	7.977.101.300,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	7.977.101.300,00
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	223.704.900	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dok	223.704.900
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	193.887.800	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	193.887.800
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	955.625.500	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	955.625.500
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	488.834.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dok	488.834.000

2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	326.475.100	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dok	326.475.100
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan Media Center	60.504.000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Lay	60.504.000
	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	33 Kelompok	274.715.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	33 Kelompok	274.715.000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	7 Dokumen	5.453.355.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	7 Dokumen	5.453.355.000
2	16	03			<b>Program Aplikasi Informatika</b>				<b>11.747.952.546,00</b>	<b>Program Aplikasi Informatika</b>				<b>11.747.952.546,00</b>
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>- Persentase OPD yang terhubung jaringan VPN</b>	100%	<b>10.008.615.800,00</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>- Persentase OPD yang terhubung jaringan VPN</b>	100%	<b>10.008.615.800,00</b>
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Jenis	10.008.615.800	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Jenis	10.008.615.800
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.739.336.746,00</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.739.336.746,00</b>

2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen SPBE	187.608.700	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen SPBE	187.608.700
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Aplikasi	355.054.346	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Aplikasi	355.054.346
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	546.404.700	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	546.404.700
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	650.269.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	650.269.000
2	20				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>				<b>503.424.000,00</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>				<b>503.424.000,00</b>
2	20	02			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>		<b>Indeks Kepuasan Pengguna</b>	<b>3</b>	<b>503.424.000,00</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>		<b>Indeks Kepuasan Pengguna</b>	<b>3</b>	<b>503.424.000,00</b>
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah media penyajian data statistik sektoral</b>	<b>3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)</b>	<b>503.424.000,00</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah media penyajian data statistik sektoral</b>	<b>3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)</b>	<b>503.424.000,00</b>
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen (IPM, Analisis Gini Ratio dan SOSEK)	316.396.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen (IPM, Analisis Gini Ratio dan SOSEK)	316.396.600

2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Muara Enim	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 Orang	187.027.400	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Muara Enim	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 Orang	187.027.400
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>				<b>447.789.500,00</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>				<b>447.789.500,00</b>
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90%	447.789.500,00	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90%	447.789.500,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90%	339.502.500,00	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90%	339.502.500,00
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	174.387.200	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	174.387.200
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 OPD	165.115.300	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0%	165.115.300
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah OPD yang melaksanakan jaring komunikasi sandi</b>	<b>9 OPD</b>	<b>108.287.000,00</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Muara Enim	<b>Jumlah OPD yang melaksanakan jaring komunikasi sandi</b>	<b>9 OPD</b>	<b>108.287.000,00</b>
2	21	02	2.02	01	Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 OPD	108.287.000	Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 OPD	108.287.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>28.143.247.389,00</b>			-	<b>28.143.247.389,00</b>	

A. Isu Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

pengembangan jaringan seluler di selenggarakan di seluruh kecamatan, dan dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati pasal 16 ayat 4 ( sistem jaringan telekomunikasi )

1. Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi:
  - a. sistem jaringan kabel
  - b. sistem jaringan nirkabel
2. Penyelenggaraan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Meliputi :
  - a. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal
  - b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh
  - c. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional.
3. Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial dan
  - b. Penyelenggaraan berifat satelit.
4. Pengembangan jaringan seluler di selenggarakan di seluruh kecamatan, dan dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

B. Program dan Kegiatan pada RPJMN di Sektor Telekomunikasi dan Informatika menyangkut kebijakan antara lain :

- a. Pengembangan Serat Optik antar Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
- c. Pelaksanaan dan Implementasi Telekomunikasi

Adapun Implementasi atau Pelaksanaan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim untuk sistem jaringan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Untuk Penyelenggaraan Jaringan yang di Kelola bagi Kepentingan Pemerintah Daerah yaitu :
  - Jaringan Siak Online oleh internet

Untuk Penyelenggaraan Jaringan yang di kelola oleh pihak ketiga yang ada di Kabupaten Muara Enim terdiri dari :

- a. Jaringan dengan satelit telah berdiri sebanyak 203 Menara Telekomunikasi yang di kelola oleh 12 perusahaan
- b. Jaringan dengan menggunakan Kabel fiber Optik yang di kelola oleh pihak Telkomsel/Telkom

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan Tupoksi sebagai tugas pokok pemberdayaan komunikasi dan informatika program dan kegiatan pada Dinas komunikasi dan informatika lebih banyak pada kegiatan non fisik dibandingkan kegiatan fisik. Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD sampai saat ini usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yaitu usulan masyarakat dari Kecamatan-Kecamatan usulan berupa Pembangunan tower jaringan seluler, Penyediaan layanan hotspot internet ruang publik, sedangkan dari fraksi fraksi di DPR diusulkan ke Dinas Komunikasi Dan Informatika yaitu untuk Memasang Jaringan Internet di desa-desa yang masih Blank Spot untuk dianggarkan dan meminta kegiatan tersebut bisa di pertahankan di masa-masa yang akan datang.

Untuk pembagunan tower jaringan seluler , Dinas komunikasi dan Informatika tidak bisa memenuhi karena pembagunan tower tersebut bukanlah kewenangan daerah melaikan kewenangan pusat, dalam hal ini dinas komunikasi dan informatika bisa menjembatani agar desa mengajukan proposal atau usulan ke provider atau penyedia layanan telekomunikasi melalui diskominfo dan akan difasilitasi untuk peningkatan jaringan tersebut, sedangkan terhadap usulan DPR Memasang Jaringan Internet di desa-desa yang masih Blank Spot sudah dipasang vsat dan dianggarkan mulai dari tahun 2021 s.d tahun anggaran 2024 tetap dianggarkan.

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DARI PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )

<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>
--------------------	--

### **3.1 Telaahan terhadap RPD dan Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow fuction;g*
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim disusun dengan memperhatikan Kebijakan nasional serta juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPD Kabupaten Muara Enim. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sehingga program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim telah sesuai dengan kebijakan nasional yang gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim**

#### **1. Tujuan**

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2024 - 2026 dengan memperhatikan tujuan, sasaran rencana pembangunan daerah kabupaten tahun 2024-2026 dan norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah. Sehingga Tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

#### **2. Sasaran**

1. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya keterbukaan informasi

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026**  
**Kabupaten Muara Enim**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.1. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.1.1 Indeks SPBE	Strategi meningkatkan E-Government di Kabupaten Muara Enim	Mendorong Pengembangan dan Peningkatan Komunikasi dan Informasi Kepada Masyarakat
	1.2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi	1.1.2 Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Strategi meningkatkan penyebaran informasi publik.	Mendorong Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut Program SKPD merupakan Program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana Program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan SKPD di dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini di dasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD dimana penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah dengan memperhatikan penyelarasan program prioritas nasional RPJMN tahun 2020 – 2024, evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) renstra perangkat daerah, evaluasi kontribusi (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome), isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Adapun Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dalam rencana strategis tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
  - b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - f. Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - b. Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  - c. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Pengamanan barang milik daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan bahan logistik kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Fasilitasi kunjungan tamu ditargetkan
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
  - b. Pengadaan mebel
7. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **II. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Monitoring opini dan aspirasi publik
  - b. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
  - c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - d. Pengelolaan media komunikasi publik
  - e. Pelayanan informasi publik
  - f. Layanan hubungan media
  - g. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
  - h. Penyelenggaraan hubungan masyarakat

## **III. Program Aplikasi Informatika**

1. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - c. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - d. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
  - e. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.

## **IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral.

- b. Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

## **V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota
  - a. Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan untuk tahun 2024-2026 secara rinci pada tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Muara Enim**

**Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
1		3	4	5	6,00	7	8	9	10
2		Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar			28.143.247.389,00				30.008.835.767,90
2	16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	27.192.033.889,00			1,00	29.911.237.277,90
2	16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	47.383.900,00				52.122.290,00
2	16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	20.363.200	APBD Kabupaten Muara Enim		1 dokumen	22.399.520,00
2	16 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	8.549.200	APBD Kabupaten Muara Enim		1 dokumen	9.404.120,00
2	16 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	4.820.000	APBD Kabupaten Muara Enim		1 dokumen	5.302.000,00
2	16 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	2.466.400	APBD Kabupaten Muara Enim		1 dokumen	2.713.040,00
2	16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Muara Enim	12 laporan	5.143.200	APBD Kabupaten Muara Enim		12 laporan	5.657.520,00

2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Muara Enim	5 Dokumen	6.041.900	APBD Kabupaten Muara Enim	5 Dokumen	6.646.090,00
<b>1</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Kabupaten Muara Enim	<b>100%</b>	<b>4.672.562.997,00</b>			<b>5.139.819.296,70</b>
1	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Muara Enim	34 Orang	4.660.637.897		34 Orang	5.126.701.686,70
1	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Kabupaten Muara Enim	1 Laporan	6.241.400	APBD Kabupaten Muara Enim	1 Laporan	6.865.540,00
1	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Muara Enim	2 Laporan	5.683.700	APBD Kabupaten Muara Enim	2 Laporan	6.252.070,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>36.729.000,00</b>			<b>40.401.900,00</b>
2	16	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Muara Enim	3 Dok	36.729.000,00	APBD Kabupaten Muara Enim	3 Dok	40.401.900,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>85.520.000,00</b>			<b>94.072.000,00</b>
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kabupaten Muara Enim	34 Buah	18.020.000,00	APBD Kabupaten Muara Enim	34 Buah	19.822.000,00
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Muara Enim	14 Orang	67.500.000,00	APBD Kabupaten Muara Enim	14 Orang	74.250.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>1.326.072.800,00</b>			<b>1.458.680.080,00</b>
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	1 Paket	15.067.300	APBD Kabupaten Muara Enim	1 Paket	16.574.030,00

2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	16 Paket	189.839.700	APBD Kabupaten Muara Enim		16 Paket	208.823.670,00
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	3 Paket	36.956.500	APBD Kabupaten Muara Enim		3 Paket	40.652.150,00
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	2 Paket	129.698.500	APBD Kabupaten Muara Enim		2 Paket	142.668.350,00
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	1 Paket	37.792.200	APBD Kabupaten Muara Enim		1 Paket	41.571.420,00
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Muara Enim	11 Dokumen	14.625.600	APBD Kabupaten Muara Enim		11 Dokumen	16.088.160,00
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Enim	24 Laporan	16.320.000	APBD Kabupaten Muara Enim		24 Laporan	17.952.000,00
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Enim	150 laporan	885.773.000	APBD Kabupaten Muara Enim		150 laporan	974.350.300,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>173.963.270,00</b>				<b>136.359.597,00</b>
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	2 Unit kendaraan dinas roda 2	50.000.000				
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	2 Paket	123.963.270	APBD Kabupaten Muara Enim		2 Paket	136.359.597,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100%</b>	<b>326.027.035,00</b>				<b>358.629.738,50</b>
2	16	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Muara Enim	1 Laporan	14.352.000	APBD Kabupaten Muara Enim		1 Laporan	15.787.200,00
2	16	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	3 Laporan	178.475.035	APBD Kabupaten Muara Enim		3 Laporan	196.322.538,50
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	3 Laporan	133.200.000	APBD Kabupaten Muara Enim		3 Laporan	146.520.000,00

2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>		100%	<b>798.721.041,00</b>				<b>878.593.145,10</b>
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Muara Enim	19 Unit	296.609.541	APBD Kabupaten Muara Enim		100%	326.270.495,10
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Muara Enim	1 Gedung Kantor	394.701.500	APBD Kabupaten Muara Enim		1 Gedung Kantor	434.171.650,00
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	4 Unit	30.950.000	APBD Kabupaten Muara Enim		4 Unit	34.045.000,00
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Muara Enim	3 Unit	76.460.000	APBD Kabupaten Muara Enim		3 Unit	84.106.000,00
2	16				<b>Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika</b>				<b>19.725.053.846,00</b>				<b>20.503.375.196,00</b>
2	16	02			<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase diseminasi konten media komunikasi publik</b>		90%	<b>7.977.101.300,00</b>				<b>8.755.422.650,00</b>
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah media komunikasi publik yang dikelola</b>			<b>7.977.101.300,00</b>				<b>8.755.422.650,00</b>
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	223.704.900	APBD Kabupaten Muara Enim		1 dokumen	246.075.390,00
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	193.887.800	APBD Kabupaten Muara Enim		1 dokumen	193.887.800,00

2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim	5 Dokumen	955.625.500	APBD Kabupaten Muara Enim		5 Dokumen	1.051.188.050,00
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim	1 Dokumen	488.834.000	APBD Kabupaten Muara Enim		1 Dokumen	537.717.400,00
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Muara Enim	1 Dokumen	326.475.100	APBD Kabupaten Muara Enim		1 Dokumen	359.122.610,00
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kabupaten Muara Enim	1 Layanan Media Center	60.504.000	APBD Kabupaten Muara Enim		1 Layanan Media Center	66.554.400,00
	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	33 Kelompok	274.715.000	APBD Kabupaten Muara Enim		33 Kelompok	302.186.500,00
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	7 Dokumen	5.453.355.000	APBD Kabupaten Muara Enim		7 Dokumen	5.998.690.500,00
2	16	03			<b>Program Aplikasi Informatika</b>				<b>11.747.952.546,00</b>				<b>11.747.952.546,00</b>
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>- Persentase OPD yang terhubung jaringan VPN</b>		100%	<b>10.008.615.800,00</b>				<b>10.008.615.800,00</b>
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	5 Jenis	10.008.615.800	APBD Kabupaten Muara Enim		5 Jenis	11.009.477.380,00
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.739.336.746,00</b>				<b>1.739.336.746,00</b>
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	1 dokumen SPBE	187.608.700	APBD Kabupaten Muara Enim		1 dokumen SPBE	206.369.570,00

2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kabupaten Muara Enim	2 Aplikasi	355.054.346	APBD Kabupaten Muara Enim		2 Aplikasi	390.559.780,60
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kabupaten Muara Enim	1 Dokumen	546.404.700	APBD Kabupaten Muara Enim		1 Dokumen	601.045.170,00
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	1 Dokumen	650.269.000	APBD Kabupaten Muara Enim		1 Dokumen	715.295.900,00
2	20				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>				<b>503.424.000,00</b>				<b>553.766.400,00</b>
2	20	02			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna</b>		<b>3</b>	<b>503.424.000,00</b>				<b>553.766.400,00</b>
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah media penyajian data statistik sektoral</b>		<b>3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)</b>	<b>503.424.000,00</b>				<b>553.766.400,00</b>
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Muara Enim	3 Dokumen (IPM, Analisis Gini Ratio dan SOSEK)	316.396.600	APBD Kabupaten Muara Enim		3 Dokumen (IPM, Analisis Gini Ratio dan SOSEK)	348.036.260,00
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Muara Enim	200 Orang	187.027.400	APBD Kabupaten Muara Enim		200 Orang	205.730.140,00
2	21				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>				<b>447.789.500,00</b>				<b>492.568.450,00</b>
2	21	02			<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>		<b>90%</b>	<b>447.789.500,00</b>				<b>492.568.450,00</b>
2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>		<b>90%</b>	<b>339.502.500,00</b>				<b>373.452.750,00</b>
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Muara Enim	4 Laporan	174.387.200	APBD Kabupaten Muara Enim		4 Laporan	191.825.920,00

2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kabupaten Muara Enim	25 OPD	165.115.300	APBD Kabupaten Muara Enim	25 OPD	181.626.830,00
												119.115.700,00
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan jaring komunikasi sandi		9 OPD	108.287.000,00			
2	21	02	2.02	01	Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kabupaten Muara Enim	9 OPD	108.287.000	APBD Kabupaten Muara Enim	9 OPD	119.115.700,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>28.143.247.389,00</b>			<b>30.008.835.767,90</b>

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Muara Enim



**ARDIAN ARIFANARDI, AP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740720 199311 1 001

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah kabupaten. Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini telah mencoba untuk memperjelas pengertian, ruang lingkup dan sebagai pedoman SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2024.

Pedoman ini telah dirancang dengan pendekatan bersinergi sehingga dapat melakukan penyesuaian-peyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan dan kapasitas perencanaan pada SKPD Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat perinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Agar pedoman ini dapat digunakan secara efektif, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Muara Enim akan mensosialisasikan pedoman ini di lingkup SKPD Kantor Kominfo dan menyusun Peraturan Kepala SKPD tentang Penyusunan Renja SKPD.

Muara Enim

2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**ARDIAN ARIFANARDI, AP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197407201993111001